

**PENANGANAN AKSI TERORISME OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR
POLRI DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Oleh:

ALKANA PRISMA PILANTA

201620252007



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Penanganan Aksi Terorisme Oleh Densus 88
Anti Teror Polri Ditinjau Dari Kebijakan
Hukum Pidana Dan Perspektif Hak Asasi
Manusia**

Nama Mahasiswa : **Alkana Prisma Pilanta**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201620252007**

Program Studi/Fakultas : **Magister Hukum/Hukum**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jakarta, November 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403


Dr. Ir. H.M. Hanafa Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penanganan Aksi Terorisme Oleh Densus
88 Anti Teror Polri Ditinjau Dari
Kebijakan Hukum Pidana Dan Perspektif
Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Alkana Prisma Pilanta

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620252007

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 November 2018

Jakarta, November 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. KOESPARMONO IRSAN, S.IK. SH, MB

NIDK : 0324034001

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH

NIDN : 0323035802

MENGETAHUI,

PLH. Ketua Program Studi

Magister Hukum

Pjs Dekan

Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, S.H.,MSi,LL.M.Ph.D

NIP: 1809353

Bhatara Ibnu Reza, S.H. MSi,LL.M.Ph.D

NIP: 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penanganan Aksi Terorisme Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana Dan Perspektif Hak Asasi Manusia

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, November 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Alkana Prisma Pilanta

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Upaya penanggulangan tidak pidana terorisme merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam rangka melindungi warganya dari setiap ancaman fisik maupun psikis yang sering terjadi sebagai implikasi dari aksi para pelaku teror. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2003 akhirnya secara resmi Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri disingkat Densus 88 AT Polri.

Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dengan dibentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT Polri). Tujuan dengan keberadaan Densus 88 Anti Teror Polri sebagai satu-satunya pasukan khusus dalam penanganan terorisme ini diharapkan dapat mengatasi masalah terorisme di Indonesia, akan tetapi justru sebagian anggota Densus 88 AT Polri yang terlibat dalam penanganan terorisme sering memunculkan masalah baru yang kontroversial, dalam proses penanganannya yang cenderung mengabaikan hak asasi manusia, bahkan dalam beberapa aksi, Densus 88 AT Polri menghabisi nyawa para terduga teroris tanpa proses hukum.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan berbagai kewenangan Densus 88 Anti Teror Polri yang termuat didalam peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya masih cenderung memiliki kelemahan dalam mengakomodir kepentingan hak asasi manusia dari setiap terduga maupun tersangka tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diharapkan dapat menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme serta sebagai inovasi dalam hal metode kontra terorisme yang lebih fleksibel dan berorientasi. Dengan demikian, untuk menyelaraskan, menyeimbangkan bahkan mengatur agar operasi keamanan melawan terorisme sesuai dengan hak asasi manusia adalah sangat penting dan mendesak untuk dilakukan Densus 88 AT Polri, selaku representasi dari negara, harus tetap menghormati hak sipil dan politik khususnya hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.

Kata Kunci: *“Terorisme, Densus 88 AT Polri, Hak Asasi Manusia, Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018”*

ABSTRACT

Terrorism is a crime against humanity and civilization, and is one of the serious threats to the sovereignty of each country. Efforts to overcome non-criminal terrorism are a must for the government in order to protect its citizens from any physical or psychological threats that often occur as an implication of the actions of terrorists. Therefore, the government in this case the National Police of the Republic of Indonesia (Polri) finally officially released the Chief of Police of the Indonesian National Police Skep No. 30 / VI / 2003 dated June 20, 2003, marked the establishment of the Polri Special Anti-Terrorism Detachment 88 abbreviated as Densus 88 AT Polri.

The existence of the Kapolri Skep is a follow-up to the issuance of Law No. 15 of 2003 concerning Crime of Terrorism with the establishment of Special Anti-Terrorism Detachment 88 of the Indonesian National Police (Densus 88 AT Polri). The aim of the existence of the Polri Anti-Terror Detachment 88 as the only special force in handling terrorism is expected to overcome the problem of terrorism in Indonesia, but in fact some members of Densus 88 AT Polri who are involved in handling terrorism often raise controversial new problems, in the process of handling who tend to ignore human rights, even in some actions, Detachment 88 AT Polri killed the lives of suspected terrorists without legal proceedings.

The research method used in writing this thesis is to use the descriptive method of analysis, which is a complete picture of social settings or the relationship between the phenomena being tested. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Besides that, primary data is also used as supporting legal data for secondary data. For data analysis performed by normative juridical analysis method.

The results of this study show the various authorities of the National Anti-Terrorism Detachment 88 contained in the laws and regulations. Some of them are still likely to have weaknesses in accommodating the interests of human rights of any suspected or suspected criminal acts of terrorism. Therefore, Law Number 5 of 2018 is expected to be an umbrella and coordinating act for other laws and regulations relating to the eradication of criminal acts of terrorism as well as innovations in terms of counter-terrorism methods that are more flexible and oriented. Thus, to harmonize, balance and even regulate that security operations against terrorism in accordance with human rights are very important and urgent to do Detachment 88 AT Polri, as a representative of the state, must continue to respect civil and political rights especially rights that cannot reduced under any circumstances.

Keywords: *“Terrorism, Detachment 88 AT Polri and Human Rights”*

ABSTRACT

Terrorism is a crime against humanity and civilization, and is one of the serious threats to the sovereignty of each country. Efforts to overcome non-criminal terrorism are a must for the government in order to protect its citizens from any physical or psychological threats that often occur as an implication of the actions of terrorists. Therefore, the government in this case the National Police of the Republic of Indonesia (Polri) finally officially released the Chief of Police of the Indonesian National Police Skep No. 30 / VI / 2003 dated June 20, 2003, marked the establishment of the Polri Special Anti-Terrorism Detachment 88 abbreviated as Densus 88 AT Polri.

The existence of the Kapolri Skep is a follow-up to the issuance of Law No. 15 of 2003 concerning Crime of Terrorism with the establishment of Special Anti-Terrorism Detachment 88 of the Indonesian National Police (Densus 88 AT Polri). The aim of the existence of the Polri Anti-Terror Detachment 88 as the only special force in handling terrorism is expected to overcome the problem of terrorism in Indonesia, but in fact some members of Densus 88 AT Polri who are involved in handling terrorism often raise controversial new problems, in the process of handling who tend to ignore human rights, even in some actions, Detachment 88 AT Polri killed the lives of suspected terrorists without legal proceedings.

The research method used in writing this thesis is to use the descriptive method of analysis, which is a complete picture of social settings or the relationship between the phenomena being tested. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Besides that, primary data is also used as supporting legal data for secondary data. For data analysis performed by normative juridical analysis method.

The results of this study show the various authorities of the National Anti-Terrorism Detachment 88 contained in the laws and regulations. Some of them are still likely to have weaknesses in accommodating the interests of human rights of any suspected or suspected criminal acts of terrorism. Therefore, Law Number 5 of 2018 is expected to be an umbrella and coordinating act for other laws and regulations relating to the eradication of criminal acts of terrorism as well as innovations in terms of counter-terrorism methods that are more flexible and oriented. Thus, to harmonize, balance and even regulate that security operations against terrorism in accordance with human rights are very important and urgent to do Detachment 88 AT Polri, as a representative of the state, must continue to respect civil and political rights especially rights that cannot reduced under any circumstances.

Keywords: *“Terrorism, Detachment 88 AT Polri and Human Rights”*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pengatur semesta alam. Karena Karunia dan Rahmat-Nya Pembuatan karya Ilmiah Tesis ini telah terselesaikan dengan judul **“PENANGANAN AKSI TERORISME OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Oleh karena itu sebagai insan Pancasila wajarlah kalau penulis menempatkan kekuasaan ALLAH SWT diatas segalanya.

Adapun penulisan karya ilmiah tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan gelar Magister Program Studi Strata Dua (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis sadar atas keterbatasan manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi peningkatan penyusunan karya-karya Ilmiah selanjutnya. Kritik dan saran bagi penulis tidak ada kritik yang sifatnya destruktif (menghancurkan).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada yang kami hormati :

1. Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil
2. Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Bhataru Ibnu Reza, S.H.,MSi, LL.M.Ph.D sebagai Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH sebagai dosen Pembimbing I Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Ir. H. M. Hanafi Darwis, SH. S.Pd, MM sebagai dosen Pembimbing II Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan para Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Rekan kerja yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam pembuatan karya Ilmiah ini

Tidak lupa penulis minta permohonan maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja kepada semua pihak yang tidak tertulis oleh penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya Ilmiah tesis ini. Akhirnya penulis berdo'a agar semua pihak yang telah membantu penulis dilipat gandakan pahalanya. Dengan iringan do'a semoga ALLAH SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai Ibadah di sisi-Nya dan semoga karya Ilmiah ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya.

Bekasi, November 2018

Penulis

Alkana Prisma Pilanta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 13

1.3. Rumusan Masalah 14

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 14

1.5. KerangkaKonseptual..... 15

1.6. Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir 24

1.7. Metodologi Penelitian..... 38

1.8. Sistematika Penulisan 40

**BAB II : PEMAHAMAN MENGENAI TERORISME, KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) 42**

2.1 Pengertian Terorisme 42

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan/Politik Hukum
Pidana..... 59

2.3 Hak Asasi Manusia (HAM) 65

2.4 Hubungan Terorisme dan HAM 72

**BAB III : PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH
DENSUS 88 AT POLRI DITINJAU DARI PERPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA..... 75**

3.1 Gambaran Umum Densus 88 AT Polri 75

3.1.1 Sejarah dan Konsep Dasar Pembentukan Densus 88

Anti Teror Polri	80
3.1.2 Alat Kelengkapan Densus 88 Anti Teror Polri	88
3.1.3 Peran dan Fungsi Densus 88 Anti Teror Polri	91
3.1.4 Bentuk Koordinasi Densus 88 Dengan Kesatuan Anti Teror lainnya	93
3.2 Penanganan Tindak Pidana Terorisme Oleh Densus 88 AT Polri Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	98
 BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MATERI MUATAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME	
4.1.1.1 Sejarah Penanggulangan Terorisme di Indonesia	121
4.1.1.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	126
 BAB V : PENUTUP	
5.1 Simpulan	146
5.2 Saran	148
 DAFTAR PUSTAKA.....	
149	
 RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	
154	